



RENCANA KERJA TAHUN 2026

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA JAMBI**



0741-444015



Dlhkota2017@gmail.com



dlh.jambikota.go.id

**Jl. Jenderal Basuki Rahman
No. 8 Kota Baru**

KATA PENGANTAR

Puji Sukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada Rencana Strategis 2024-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Penyusunan Rencana Kerja adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dengan berorientasi pada hasil yang akan di capai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kiranya Rencana Kerja ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah selanjutnya. Kami menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, untuk itu kami mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Renja ini.

Jambi, Maret 2025



Kepala DLH Kota Jambi

Dr. H. ARDI, SP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19700612 199803 1004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-27
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-2
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	IV-1
BAB V Penutup	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	II-2
2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Jambi	II-13
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DLH Kota Jambi	II-27
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	II-35
2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 ..	II-49
3.1 Prioritas dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	III-2
3.2 Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	III-3
3.3 Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	III-3
3.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	III-4
4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IV-2
4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	IV-8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja SKPD memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14); Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota Jambi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai fungsi yaitu :

-
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung ataupun tidak langsung yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra). Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun oleh dinas. Rencana Kerja merupakan penghubung antara Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci serta merupakan alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja.

Melalui Rencana Kerja Tahunan diupayakan untuk mengadakan perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan sehingga pengelolaannya sejalan dengan pelestarian lingkungan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

-
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah (LP2P), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
 12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
 13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 2005-2025;

-
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
 15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
 16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
 17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
 18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
 19. Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Bidang Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Kerja Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
- b. Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
- c. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan DLH.
- d. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran

berbasis kinerja guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan Kota Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan selanjutnya dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2. Untuk program dan kegiatan Tahun 2024, Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 56.132.591.000,- terdiri dari Belanja Operasi Rp. 53.702.039.681,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.430.551.319,-. Realisasi hasil pelaksanaan dari anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 53.365.457.826,- atau terserap 95,07%, terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp. 50.996.100.616,- atau terserap 94,96%, sementara realisasi belanja modal sebesar Rp. 2.369.357.210,- atau terserap 97.48%. Berikut ini disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi :

Tabel. 2.1

Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	Perangkat Daerah	Kebijakan	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi					56.132.591.000		53.367.632.826	95,07			
				Belanja Operasi			53.702.039.681		50.998.275.616				
				Belanja Modal			2.430.551.319		2.369.357.210				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	BB	11.800.899.273	BB	10.591.328.671	89,75			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	83,5	50.542.185	83,7	47.821.010	94,62	100%		
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	3.598.065	2	3.174.600	88,23	100%	Sisa anggaran dikarenakan pencairan sesuai dengan peruntukannya	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2	36.837.385	2	35.888.920	97,43	100%	Sisa anggaran dikarenakan pencairan sesuai dengan peruntukannya	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA	2	3.280.306	2	2.799.580	85,35	100%	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil	

					SKPD								
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	3.538.331	3	3.223.550	91,10	100%	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	3.288.098	16	2.734.360	83,16	100%	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan	100%	9.387.413.226	100%	8.324.115.644	88,67	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	81	8.823.309.550	66	7.760.627.624	87,96	100%	Sisa anggaran karena insentif triwulan III dan IV tidak tercapai sehingga tidak dicairkan, dan adanya PNS yang sudah pensiun.	Melakukan penagihan retribusi kebersihan kepada pelaku kegiatan usaha
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen panatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	551.898.000	12	551.340.000	99,90	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	7.500.000	12	7.500.000	100,00	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	4.705.676	4	4.648.020	98,77	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	40.800.000	100%	40.800.000	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	40.800.000	12	40.800.000	100,00	100%		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index propesionalitas ASN perangkat daerah	61	258.480.000		244.508.041	94,59	100%		
				Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	164	136.530.000	154	128.205.000	93,90	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	121.950.000	17	116.303.041	95,37	100%	Sisa anggaran dikarenakan biaya kontribusi yang sudah terkunci dan digunakan dibawah anggaran yang tersedia. Biaya perjalanan dinas silpa dikarenakan biaya kontribusinya sudah habis.	Mengajukan Penyesuaian standar harga biaya kontribusi
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	629.447.878	100%	617.823.460	98,15	100%		

				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	14.739.690	2	14.675.000	99,56	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediaka	2	36.288.188	2	31.718.850	87,41	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	15.000.000	1	8.550.000	57,00	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	563.420.000	2	562.879.610	99,90	100%		
				Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	292.169.287	100%	290.176.000	99,32	100%		
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	292.169.287	11	290.176.000	99,32	100%		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	816.571.931	100%	743.224.716	91,02	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	-	0%		

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	408.600.000	1	363.959.017	89,07	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	135.030.731	5	124.892.800	92,49	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	272.941.200	12	254.372.899	93,20	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	325.474.766	100%	282.859.800	86,91	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	264.509.677	73	222.837.800	84,25	100%	Sisa anggaran dikarenakan pajak beberapa kendaraan yang tidak bisa dibayarkan karna tidak ada BPKB.	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	60.965.089	23	60.022.000	98,45	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas								

2				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	100%	8.085.120	100%	8.000.000	98,95	100%		
				Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Tersusunya RPPLH Kota Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	0%	0	0	0	-			
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	0%	0	0	0	-	0%		
3				Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Keselarasn Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Perencanaan	100%	8.085.120	100%	8.000.000	98,95	100%		
				Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan di evaluasi	1	8.085.120	1	8.000.000	98,95	100%		
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	7	1.439.505.815	7	1.412.715.674	98,14	100%		
				Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	1.410.405.815	100	1.383.615.674	98,10	100%		
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,	2	89.088.040	2	88.665.734	99,53	100%		

				Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Udara, dan Laut								
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	61.129.291	1	57.714.077	94,41	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks kualitas ekosistem gambut dan indeks kualitas air laut)	15	84.504.000	15	80.581.100	95,36	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	2	70.068.080	2	68.524.208	97,80	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	83.416.970	1	81.437.000	97,63	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12	1.022.199.434	12	1.006.693.555	98,48	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup								

				Hidup Kabupaten/ Kota	di Kota Jambi								
				Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0	0	0	0	-	0%		
4				Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	0,40%	29.100.000	9,56%	29.100.000	100,00	100%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	300	29.100.000	300	29.100.000	100,00	100%		
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	49,93	7.094.360.822	50,87	6.914.610.440	97,47	100%		
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi	0,08%	7.094.360.822	0,02	6.914.610.440	97,47	100%		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/ kota	3	1.170.509.320	3	1.165.517.544	99,57	100%		

5				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	971,18	5.571.803.243	971,18	5.398.695.950	96,89	100%	Sisa anggaran BBM, gaji PHL dikarenakan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	53	352.048.259	53	350.396.946	99,53	100%		
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100%	23.269.115	100%	21.170.975	90,98	100%		
				Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3	100%	18.839.435	100%	16.995.975	90,21	100%		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17	12.843.260	17	12.548.000	97,70	100%	Sisa anggaran dikarenakan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20	5.996.175	6	4.447.975	74,18	50%	Sisa anggaran dikarenakan anggaran perjalanan dinas digunakan sesuai dengan pengajuan dari perusahaan.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha

6				Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan	100%	4.429.680	14	4.175.000	-			
				Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	100	4.429.680	14	4.175.000	-			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%	247.002.275	100%	230.579.918	93,35	100%		
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup	100%	247.002.275	100%	230.579.918	93,35	100%		
				Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150	88.509.850	110	88.185.690	99,63	100%		

7				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti bimtek/kursus/pelatihan	9	47.000.000	4	33.094.218	70,41	100%	Sisa anggaran dikarenakan adanya bimtek yang dilaksanakan secara online serta biaya bimtek yang beberapa sudah ditanggung panitia.	
				Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	160	111.492.425	163	109.300.010	98,03	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	89.689.330	100	85.055.000	94,83	100%		
				Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	89.689.330	100	85.055.000	94,83	100%		
8				Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan	2	17.698.950	2	17.595.000	99,41	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	

					Hidup yang Dilaksanakan								
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3	71.990.380	3	67.460.000	93,71	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	87.456.400	100%	86.339.885	98,72	100%		
				Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	87.456.400	100%	86.339.885	98,72	100%		
9				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	35	16.587.800	2	16.456.815	99,21	100%	Sisa anggaran dikarenakan tidak adanya kasus yang memerlukan uji laboratorium.	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui	18	70.868.600	54	69.883.070	98,61	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	

					Pengadilan								
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	97,25%	35.342.322.850	96,41%	34.017.832.263	96,25	100%		
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA	23,00%	35.342.322.850	22,46%	34.017.832.263	96,25	100%		
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Masyarakat	2	23.274.960	3	23.108.050	99,28	100%		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	4.950.000	1	4.950.000	100,00	100%		

				Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	116613,84	25.968.914.904	133995,63	25.673.978.486	98,86	100%	Sisa anggaran dikarenakan pembayaran gaji PHL disesuaikan dengan kehadiran, BBM	
				Sub Kegiatan Pengurangan Sampah melalui Pendaauran Ulang Sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	11417	836.367.454	19298,19	819.098.630	97,94	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	200000	8.508.815.532	131.616.630	7.496.697.097	88,11	100%	Sisa anggaran dikarenakan adanya selisih harga BBM dextrite dan dicairkan sesuai SPJ	

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Jambi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) /Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2,11	Urusan Lingkungan Hidup		43.773.380.000	50.984.744.563	56.132.591.000	53.367.632.826	95,07%	57.257.670.000	161.610.047.389	177,02%
2.11.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	13.922.820.345	9.996.888.868	11.800.899.273	10.591.328.671	89,75%	13.876.238.449	34.464.455.988	210,14%
2.11.0 1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	28.817.489	71.321.960	50.542.185	47.821.010	94,62%	84.432.221	203.575.191	194,81%
2.11.0 1.2.01 .0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	21.007.611	4.214.600	3.598.065	3.174.600	88,23%	29.909.701	37.298.901	364,70%

2.11.0 1.2.01 .0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD		57.973.800	36.837.385	35.888.920	97,43%	39.015.125	132.877.845	191,51%
2.11.0 1.2.01 .0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD		4.287.400	3.280.306	2.799.580	85,35%	5.445.327	12.532.307	108,92%
2.11.0 1.2.01 .0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		2.172.760	3.538.331	3.223.550	91,10%	4.609.565	10.005.875	161,61%
2.11.0 1.2.01 .0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7.809.878	2.673.400	3.288.098	2.734.360	83,16%	5.452.503	10.860.263	151,11%
2.11.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan	12.130.732.000	8.134.788.446	9.387.413.226	8.324.115.644	88,67%	10.778.073.884	27.236.977.974	210,64%
2.11.0 1.2.02 .0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11.645.766.000	7.647.664.306	8.823.309.550	7.760.627.624	87,96%	10.149.934.384	25.558.226.314	208,74%
2.11.0 1.2.02 .0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen panatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	468.240.000	473.575.000	551.898.000	551.340.000	99,90%	608.140.000	1.633.055.000	244,41%
2.11.0 1.2.02 .0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.050.000	9.876.000	7.500.000	7.500.000	100,00%	13.323.500	30.699.500	306,93%

2.11.0 1.2.02 .0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.676.000	3.673.140	4.705.676	4.648.020	98,77%	6.676.000	14.997.160	182,39%
2.11.0 1.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	100,00%	40.800.000	122.400.000	146,53%
2.11.0 1.2.03 .0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	100,00%	40.800.000	122.400.000	146,53%
2.11.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index propesionalitas ASN perangkat daerah	177.600.000	191.747.445	258.480.000	244.508.041	94,59%	348.940.000	785.195.486	173,30%
2.11.0 1.2.05 .0001	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	133.200.000	122.140.000	136.530.000	128.205.000	93,90%	195.360.000	445.705.000	247,50%
2.11.0 1.2.05 .0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44.400.000	69.607.445	121.950.000	116.303.041	95,37%	153.580.000	339.490.486	124,36%
2.11.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	180.164.063	446.753.074	629.447.878	617.823.460	98,15%	444.117.339	1.508.693.873	209,68%

2.11.0 1.2.06 .01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13.274.275	11.345.000	14.739.690	14.675.000	99,56%	13.274.275	39.294.275	207,12%
2.11.0 1.2.06 .0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21.889.788	28.035.000	36.288.188	31.718.850	87,41%	28.978.064	88.731.914	195,59%
2.11.0 1.2.06 .0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000	17.225.000	15.000.000	8.550.000	57,00%	18.000.000	43.775.000	137,04%
2.11.0 1.2.06 .0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.500.000	390.148.074	563.420.000	562.879.610	99,90%	383.865.000	1.336.892.684	214,51%
2.11.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		73.500.000	292.169.287	290.176.000	99,32%	507.947.293	871.623.293	311,63%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								
2.11.0 1.2.07 .0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		43.200.000				120.872.340	164.072.340	108,73%
2.11.0 1.2.07 .0006	Sub Kegiatan Pengadaan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		30.300.000	292.169.287	290.176.000	99,32%	387.074.953	707.550.953	549,33%

2.11.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	1.006.307.293	767.404.553	816.571.931	743.224.716	91,02%	726.398.212	2.237.027.481	216,84%
2.11.0 1.2.08 .0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat							-	0,00%
2.11.0 1.2.08 .0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	442.500.000	381.977.358	408.600.000	363.959.017	89,07%	426.100.000	1.172.036.375	201,32%
2.11.0 1.2.08 .0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	140.000.000	123.244.010	135.030.731	124.892.800	92,49%	84.365.612	332.502.422	391,74%
2.11.0 1.2.08 .0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	423.807.293	262.183.185	272.941.200	254.372.899	93,20%	215.932.600	732.488.684	206,96%
2.11.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	358.399.500	270.573.390	325.474.766	282.859.800	86,91%	945.529.500	1.498.962.690	187,82%
2.11.0 1.2.09 .0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	285.140.500	228.727.590	264.509.677	222.837.800	84,25%	285.140.500	736.705.890	183,80%

2.11.0 1.2.09 .0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara Lainnya	53.259.000	40.245.800	60.965.089	60.022.000	98,45%	53.259.000	153.526.800	219,89%
2.11.0 1.2.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20.000.000	1.600.000				607.130.000	608.730.000	185,91%
2.11.0 1.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan pelayanan BLUD	741.446.000					741.446.000	741.446.000	100,00%
2.11.0 1.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	741.446.000	0	0			741.446.000	741.446.000	100,00%
2.11.0 2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	5.457.975	147.809.000	8.085.120	8.000.000	98,95%	667.949.916	823.758.916	4118,79%
2.11.0 2.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Kota	-					349.999.130		
2.11.0 2.2.01 .0003	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun						349.999.130		

2.11.0 2.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJPD/RPJMD	5.457.975	147.809.000	8.085.120	8.000.000	98,95%	317.950.786	473.759.786	2368,80%
2.11.0 2.2.02 .0002	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	-	147.809.000		8.000.000		317.950.786	473.759.786	
2.11.0 2.2.02 .0004	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan di evaluasi	5.457.975,00	-	8.085.120	8.000.000	98,95%		8.000.000	40,00%
2.11.0 3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	1.037.884.384	1.127.756.610	1.439.505.815	1.412.715.674	98,14%	1.521.955.774	4.062.428.058	153,68%
2.11.0 3.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	1.006.418.449	956.131.124	1.410.405.815	1.383.615.674	98,10%	1.475.663.554	3.815.410.352	179,54%
2.11.0 3.2.01 .0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	70.336.878,00	128.478.000	89.088.040	88.665.734	99,53%	87.186.650	304.330.384	84,44%

2.11.0 3.2.01 .0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	51.081.514,00	81.866.395	61.129.291	57.714.077	94,41%	48.637.450	188.217.922	63,54%
2.11.0 3.2.01 .0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks kualitas ekosistem gambut dan indeks kualitas air laut)	166.470.665,00	-	84.504.000	80.581.100	95,36%	435.183.410	515.764.510	
2.11.0 3.2.01 .0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	47.447.212,00	-	70.068.080	68.524.208	97,80%	79.615.945	148.140.153	
2.11.0 3.2.01 .0011	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	57.931.833,00	-	83.416.970	81.437.000	97,63%	80.617.400	162.054.400	
2.11.0 3.2.01 .0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	613.150.347,00	745.786.729	1.022.199.434	1.006.693.555	98,48%	744.422.699	2.496.902.983	170,03%
2.11.0 3.2.02	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	3.331.516	171.625.486	0	0		4.697.220	176.322.706	44,30%

2.11.0 3.2.02 .0001	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3.331.516,00	171.625.486				4.697.220	176.322.706	44,30%
2.11.0 3.2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	28.134.419		29.100.000	29.100.000	100,00%	41.595.000	70.695.000	58,80%
2.11.0 3.2.03 .0011	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	28.134.419,00		29.100.000	29.100.000	100,00%	41.595.000	70.695.000	58,80%
2.11.0 4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	5.001.990.907	6.655.883.000	7.094.360.822	6.914.610.440	97,47%	7.296.050.632	20.866.544.072	211,49%
2.11.0 4.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi	5.001.990.907	6.655.883.000	7.094.360.822	6.914.610.440	97,47%	7.296.050.632	20.866.544.072	211,49%
2.11.0 4.2.01 .0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3.960.132.625	5.405.714.600	5.571.803.243	5.398.695.950	96,89%	5.545.612.834	16.350.023.384	218,71%
2.11.0 4.2.01 .0007	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	246.586.493	437.284.000	352.048.259	350.396.946	99,53%	340.344.766	1.128.025.712	181,70%

2.11.0 4.2.01 .0009	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/ kota	795.271.789,00	812.884.400	1.170.509.320	1.165.517.544	99,57%	1.410.093.032	3.388.494.976	191,42%
2.11.0 5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	76.630.000	41.030.000	23.269.115	21.170.975	90,98%		62.200.975	81,17%
2.11.0 5.2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3	41.868.879	41.030.000	18.839.435	16.995.975	90,21%	17.783.625	75.809.600	98,93%
2.11.0 5.2.01 .0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	26.165.047	36.680.000	12.843.260	12.548.000	97,70%	12.673.125	61.901.125	96,52%
2.11.0 5.2.01 .0002	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	26.165.047,00	4.350.000	5.996.175	4.447.975	74,18%	5.110.500	13.908.475	111,27%

2.11.0 5.2.02	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi fasilitas pelayanan kesehatan diluar	15.703.832	0	4.429.680	4.175.000	94,25%	25.348.870	29.523.870	
2.11.0 5.2.02 .0004	Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	15.703.832,00	-	4.429.680	4.175.000	94,25%	25.348.870	29.523.870	
2.11.0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	188.573.544	168.045.522	247.002.275	230.579.918	93,35%	275.073.166	673.698.606	112,48%
2.11.0 6.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup	188.573.544	168.045.522	247.002.275	230.579.918	93,35%	275.073.166	673.698.606	112,48%
2.11.0 6.2.01 .0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	71.070.497,00	69.870.000	88.509.850	88.185.690	99,63%	103.671.651	261.727.341	184,55%

2.11.0 6.2.01 .0007	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	31.727.946,00	10.483.222	47.000.000	33.094.218	70,41%	47.000.000	90.577.440	44,31%
2.11.0 6.2.01 .0009	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	85.775.101,00	87.692.300	111.492.425	109.300.010	98,03%	124.401.515	321.393.825	127,17%
2.11.0 8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	61.153.475	72.129.100	89.689.330	85.055.000	94,83%	136.578.780	293.762.880	53,09%
2.11.0 8.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi skala kabupaten/kota dan/atau yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensi SDMnya	61.153.475	72.129.100	89.689.330	85.055.000	94,83%	136.578.780	293.762.880	53,09%

2.11.0 8.2.01 .0002	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	49.205.575,00	46.030.000	17.698.950	17.595.000	99,41%	55.500.000	119.125.000	47,02%
2.11.0 8.2.01 .0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	Jumlah Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	11.947.900,00	26.099.100	71.990.380	67.460.000	93,71%	81.078.780	174.637.880	58,21%
2.11.0 9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup							-	0,00%
2.11.0 9.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							-	0,00%
2.11.0 9.2.01 .0001	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH							-	0,00%

2.11.0 8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	79.688.718	132.085.560	87.456.400	86.339.885	98,72%	116.212.705	334.638.150	223,09%
2.11.0 8.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	79.688.718	132.085.560	87.456.400	86.339.885	98,72%	116.212.705	334.638.150	223,09%
2.11.1 0.2.01 .0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani		10.530.000					10.530.000	
2.11.1 0.2.01 .0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		121.555.560					121.555.560	
2.11.0 8.2.01 .0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	14.640.624,00	0	16.587.800	16.456.815	99,21%	21.356.195	37.813.010	75,63%

2.11.1 0.2.01 .0006	Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	65.048.094,00	-	70.868.600	69.883.070	98,61%	94.856.510	164.739.580	164,74%
2.11.1 1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	22.692.495.773	32.643.116.903	35.342.322.850	34.017.832.263	96,25%	33.324.478.083	99.985.427.249	164,75%
2.11.1 1.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA	22.692.495.773	32.643.116.903	35.342.322.850	34.017.832.263	96,25%	33.324.478.083	99.985.427.249	164,75%
2.11.1 1.2.01 .0004	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	36.274.466,00	78.007.000	23.274.960	23.108.050	99,28%	52.843.400	153.958.450	119,14%

2.11.1 1.2.01 .0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan dan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	4.161.761,00	5.565.000	4.950.000	4.950.000	100,00%	6.064.950	16.579.950	66,28%
2.11.1 1.2.01 .0012	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	16.530.930.055	31.709.957.968	25.968.914.904	25.673.978.486	98,86%	24.837.893.973	82.221.830.427	170,39%
	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		849.586.935					1.966.755.033	
2.11.1 1.2.01 .0019	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah melalui Pendaaran Ulang Sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	601.320.491	0	836.367.454	819.098.630	97,94%	1.117.168.098	1.936.266.728	102,58%

2.11.1 1.2.01 .0020	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	5.519.809.000	0	8.508.815.532	7.496.697.097	88,11%	7.310.507.662	14.807.204.759	142,49%
---------------------------	--	---	---------------	---	---------------	---------------	--------	---------------	----------------	---------

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas, pelayanan dibidang lingkungan hidup terdiri dari :

1. Indikator Kinerja Kunci

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- b. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

- a. Hasil perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
- b. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Data Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- d. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Terasilinasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH.
- g. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kab/Kota yang ditangani.
- h. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No	Indikator IKU, IKK	Target IKU, IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,21	59,47	59,63	59,80	57,09	65,15	65,16	65,18	
2.	Indeks Kualitas Air	40,05	43,50	44,00	44,50	35,19	46,71	46,72	46,75	
3.	Indeks Kualitas Udara	80,78	88,11	88,12	88,13	88,52	90	90	90	
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,90	49,97	49,99	50,02	49,93	50,87	50,89	60,90	
5.	Persentase Jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	14,23 %	23 %	23,25 %	23,50 %	22,46%	12,59%	23,25 %	23,50 %	
6.	Persentase jumlah sampah yang ditangani	76,66 %	74,75 %	74,75 %	74,75 %	73,95%	82,54%	74,75 %	74,75 %	
7.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Jambi	90.89 %	97,75 %	98%	98,25 %	96.41%	95,13%	98%	98,25 %	
8.	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota					88% taat 12% tidak taat	95,7% taat, 5,3% tidak taat			
9.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kab/Kota					Persentase penanganan sampah 73.95%, dimana jumlah penanganan sampah 119.723, 96 terhadap timbulan sampah 161.897, 58	Persentase penanganan sampah 82.54%, dimana jumlah penanganan sampah 131.616, 63 terhadap timbulan sampah 162.341, 13			
10.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan					100%	100%			

	oleh pemerintah daerah Kab/Kota										
11.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab/Kota					8,50%	8,33%				
12.	Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kab/Kota					0%	0%				
13.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH					0%	0%				
14.	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kab/Kota yang ditangani					100%	100%				
15.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat					100%	100%				

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran umum pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup pada uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelompokkan isu-isu strategi lingkungan hidup Kota Jambi. Dari kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup dan isu strategis di dalam kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RTRW 2013-2033, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dapat

dikelompokkan menjadi beberapa isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Permasalahan pencemaran lingkungan (air, udara dan kerusakan tanah).
2. Permasalahan lingkungan perkotaan (tata ruang dan persampahan).
3. Permasalahan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
4. Permasalahan pengelolaan sungai dan danau.
5. Permasalahan pembentukan Peraturan Perundangan tentang Lingkungan Hidup di daerah.
6. Permasalahan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pembinaan, pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum lingkungan.
7. Permasalahan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
8. Permasalahan partisipasi dan peran serta masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi antara lain:

- a. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam.
- b. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
- c. Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.
- d. Lemahnya sanksi penegakan hukum bidang lingkungan dan belum adanya peraturan daerah yang cukup memadai tentang pengelolaan lingkungan di Kota Jambi serta kurangnya koordinasi antar sektor.
- e. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.

-
- g. Kapasitas Landfill TPA pada tahun 2026 tidak bisa menampung sampah, sehingga perlu pembuatan landfill baru yang membutuhkan anggaran yang besar.
 - h. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.

Dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Layanan rekomendasi surat keterangan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan.
- b. Layanan informasi pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Layanan jasa analisa laboratorium lingkungan.
- d. Pembinaan pengawasan dan pemantauan kegiatan/usaha.
- e. Layanan pengujian kualitas gas buang kendaraan bermotor (uji emisi).
- f. Layanan status mutu kualitas air limbah.
- g. Layanan pos pengaduan sengketa lingkungan.
- h. Adanya potensi pengelolaan air limbah rumah tangga yang belum ditangani secara optimal.
- i. Adanya teknologi daur ulang sampah.
- j. Masih adanya lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk pembuatan taman.
- k. Perda dan Perwal tentang pengelolaan lingkungan hidup.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu rancangan PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024 akan digunakan untuk membandingkan antara rancangan awal PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2026. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Urusan Lingkungan Hidup		Kota Jambi		59.172.921.220			Kota Jambi		54.482.374.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah		BB	16.172.568.449	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah		BB	14.821.133.386
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP		70 Nilai	84.432.221	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP		70 Nilai	30.538.100
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2 Dokumen	29.909.701	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2 Dokumen	22.973.700
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5 Dokumen	39.015.125	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	5.445.327	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	4.609.565	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	5.452.503	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	7.564.400
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan		100%	10.778.073.884	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan		100%	12.662.417.102
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		81 Orang	10.149.934.384	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		81 Orang	12.247.712.702
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		250 Dokumen	608.140.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	410.160.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	13.323.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	4.544.400
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3 Laporan	6.676.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3 Laporan	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah		100%	40.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah		100%	12.600.000

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		9 Orang	40.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		9 Laporan	12.600.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah		100%	348.940.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah		100%	177.600.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		164 stel	195.360.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		164 paket	133.200.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		13 Kali	153.580.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		11 Orang	44.400.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	444.117.339	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	145.756.764
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4 paket	13.274.275	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2 paket	10.868.790
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	28.978.064	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	13.012.974
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan	18.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	383.865.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	116.875.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	2.062.831.293	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	0

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		6 unit	1.508.467.566	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			6 Unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit	46.416.434	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		25 unit	120.872.340	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		50 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		9 unit	387.074.953	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		32 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	726.398.212	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	1.217.151.620
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai		800 pcs		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	426.100.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1.023.079.090
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Laporan	84.365.612	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Laporan	111.387.730
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Orang	215.932.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	82.684.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	945.529.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	575.069.800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		20 Unit	285.140.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		20 Unit	500.059.800

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	53.259.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	75.010.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	607.130.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD		100%	741.446.000	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD		100%	1.768.755.800
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		1 unit	741.446.000	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD TPA	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		1 unit	741.446.000
						Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Laboratorium	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		1 unit	550.000.000
						Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Laboratorium	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		1 unit	477.745.800
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD			367.949.916	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD			
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			349.999.130	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)		1 Dokumen	349.999.130	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)			

	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Keselaran penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dengan dokumen perencanaan		100%	18.175.786	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Keselaran penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dengan dokumen perencanaan			
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD		1 dokumen		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD			
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan diwvaluasi		1 dokumen	18.175.786	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan diwvaluasi			
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi		7 Nilai	1.521.978.074	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air Indkes kualitas udara		46,75 90	571.259.833
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi		100%	1.424.781.764	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi		100%	571.259.833
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		2 dokumen	87.186.650	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		2 dokumen	44.867.600
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 dokumen	48.637.450	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 dokumen	

	Sub Kegiatan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK			102.547.095	Sub Kegiatan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK		1 dokumen	55.590.751
	Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		15 Lokai	117.993.910	Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)			54.841.700
	Sub Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		2 Laporan	142.471.570	Sub Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		1 Dokumen	17.723.040
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		1 Dokumen	80.617.400	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		12 Dokumen	49.406.400
	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		12 dokumen	894.422.699	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		12 Dokumen	348.830.342
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi		100%	13.961.190	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi			

	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi PeringatanPencemaran dan/atau Kerusakan LingkunganHidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yangDilaksanakan		2 Laporan	13.961.190	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi PeringatanPencemaran dan/atau Kerusakan LingkunganHidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yangDilaksanakan			
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup		0,28%	83.235.120	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		1 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		150 M2	83.235.120	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan		50,90	7.295.450.632	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan		50,90	5.666.512.618
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi		0,02%	7.295.450.632	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi		0,02%	5.666.512.618
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		971,18 Ha	5.545.612.834	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		971.18 Ha	4.924.026.870

	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang di kelola		53 Unit	339.744.766	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang di kelola		53 Unit	327.545.748
	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Unit	1.410.093.032	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Unit	434.940.000
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		100%	43.109.995	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		100%	41.868.879
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3		100%	17.783.125	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3		100%	4.386.540
	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		17 Dokumen	17.783.125	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		15 Dokumen	4.386.540
	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			

	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 Medis Covid 19 yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan			25.348.870	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 Medis Covid 19 yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			
	Sub Kegiatan Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina		100 Usaha	25.348.870	Sub Kegiatan Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina			
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		100%	275.071.766	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		100%	30.649.400

	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup		31%	275.071.766	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup		30%	30.649.400
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		150 dokumen	103.675.876	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		150 dokumen	6.336.700
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti bimtek/kursus/ pelatihan		10 orang	47.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti bimtek/kursus/ pelatihan		4 orang	20.000.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		160 laporan	124.395.890	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		160 Badan Usaha	4.312.700
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	137.178.780	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	17.850.000

	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	137.178.780	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	17.850.000
	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		2 Dokumen	55.500.000	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		2 Dokumen	7.950.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		9 lembaga	81.678.780	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		3 lembaga	9.900.000
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup		100%	0	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup		100%	
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		100%	0	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		100%	

	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		30 dunia pendidikan/3 kantor/duta lingkungan		Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		30 dunia pendidikan/3 kantor/duta lingkungan	
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	116.214.105	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	14.496.000
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	116.214.105	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	14.496.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLHKabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani		35 Pengaduan	21.355.585	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		35 Pengaduan	6.996.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			

	Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota		18 sanksi	94.858.520	Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota		18 Sanksi	7.500.000
10	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan		98,25%	33.324.478.083	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan		98%	31.566.894.423
	Kegiatan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA		23,5%	33.324.478.083	Kegiatan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA		23,5%	31.566.894.423
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		2 kelompok	52.843.400	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		2 kelompok	28.353.420
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		1 Dokumen	6.064.950	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			

	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		1116613,84 Ton	24.837.893.973	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		116613.84 Ton	25.632.451.503
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		200000 Ton	7.310.507.662	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		2000.000 Ton	5.100.653.000
	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang		11416,94 Ton	1.117.168.098	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang		11416,94 Ton	805.436.500
					59.172.921.220					54.482.374.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan atau kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang tertuang pada Forum OPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan TPA/TPS	Kelurahan Tanjung Raden, Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden			
2	Bantuan Gerobak Motor Sampah	Kelurahan Sungai Asam, Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam			
3	Pembuatan Taman	Jl. Kh. A. Somad Rt. 05 kel. ulu gedong, Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong			
4	Pembangunan TPA/TPS	Jl. Kh. M. Zuhdi Rt. 08 kel. ulu gedong, Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong			
5	Bantuan Gerobak Motor Sampah	Jl. Kh. M. Zuhdi Rt. 08 kel. ulu gedong, Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong			
6	Bantuan Gerobak Motor Sampah	RT. 01 Kelurahan Tanjung Raden, Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden			
7	Pembangunan TPA/TPS	Rt. 01, Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang			
8	Pembangunan TPA/TPS	Rt. 03, Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang			
9	Pelatihan Keterampilan Daur Ulang Sampah	Di RT.01 s.d RT.16, Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana			
10	Pembuatan Taman	RT. 09, Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam			
11	Pembangunan TPA/TPS	JL. KH. TOMO RT 11 KEL ARAB MELAYU KEC. PELAYANGAN KOTA JAMBI, Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu			
12	Bangkit Berdaya Kecamatan	RT. 09 Kel. Aur			

	Telanaipura	Kenali, Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali			
13	Pelatihan Keterampilan Daur Ulang Sampah	Kantor Lurah Thehok, Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok			
14	Pembangunan TPA/TPS	Jln. Kapten Hasan Rt. 29, Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin			
15	Bangkit Berdaya Kecamatan Jelutung	Jalan KONI IV RT.002, Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh			
16	Bantuan Gerobak Motor Sampah	RT.008, Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh			
17	Bantuan Gerobak Motor Sampah	RT.009, Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh			
18	Pembentukan Bank Sampah	rt.07 kel.udung laut, Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut			
19	Bantuan Gerobak Motor Sampah	RT.05, Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang			
20	Pembuatan Taman	gedung balai serba guna rt.43, Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo			
21	Pembuatan Taman	kantor lurah simpang rimbo, Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo			
22	Bantuan Gerobak Motor Sampah	rt.04, Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo			
23	Pembentukan Bank Sampah	rt.12, Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo			
24	Pembentukan Bank Sampah	rt.19, Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo			
25	Pembentukan Bank Sampah	rt.21, Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo			
26	Pembentukan Bank Sampah	rt.24, Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo			
27	Pembentukan Bank Sampah	rt.35, Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo			
28	Bantuan Gerobak Motor Sampah	rt.35, Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo			
29	Pembuatan Taman	rt.35, Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo			
30	Pembentukan Bank Sampah	rt.39, Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo			
31	Bantuan Gerobak Motor	rt.41, Kota Jambi,			

	Sampah	Alam Barajo, Simpang Rimbo			
32	Bantuan Gerobak Motor Sampah	Rt.12 Tambak SARI, Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari			
33	Pembangunan TPA/TPS	Jl.patimura RT. 06 Kel. Kenali Besar, Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar			
34	Pembangunan TPA/TPS	Rt 24 Kel Tanjung Sari, Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari			
35	Pembangunan TPA/TPS	Jl. Kebun Daging RT. 011, Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai			
36	Pembangunan TPA/TPS	RT. 01 Bagan Pete , Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete			
37	Pembangunan TPA/TPS	RT. 02 Bagan Pete , Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete			
38	Pembangunan TPA/TPS	di RT. 03Bagan Pete , Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete			
39	Pembangunan TPA/TPS	RT. 04Bagan Pete , Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete			
40	Pembangunan TPA/TPS	RT. 05Bagan Pete, Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete			
41	Pembangunan TPA/TPS	RT. 06Bagan Pete , Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete			
42	Pembangunan TPA/TPS	RT. 07Bagan Pete , Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete			
43	Pembangunan TPA/TPS	RT. 08Bagan Pete, Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete			
44	Pembangunan TPA/TPS	RT. 09Bagan Pete , Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete			
45	Pembangunan TPA/TPS	i RT. 10Bagan Pete , Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete			
46	Pembangunan TPA/TPS	RT. 11Bagan Pete, Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete			
47	Bantuan Gerobak Motor Sampah	RT. 12 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin , Kota Jambi.		2 unit	KEMAS FARIED ALFARELLY, SE
48	Pembangunan TPA/TPS	RT.16 Kelurahan Pematang Sujur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.		3 titik	DYAH KUMALA DEWI ZM, SH
49	Pembangunan TPA/TPS	RT. 19 Kelurahan			MUHILLI

		Thehok Kecamatan Jambi Selatan. , Kota Jambi, ,			AMIN, SH
50	Pembentukan Bank Sampah	RT. 08 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur , Kota Jambi, ,			RIZA DELVIARISTA , SM
51	Pengadaan Taman Lansia dan Bermain Anak	Jl Liposos 2 Perum BCL RT 32 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, ,			RUDI YANTO, SP
52	Pembuatan Taman	RT. 06 Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi , Kota Jambi, ,		6x12 m	RUBI SALAM
53	Pengadaan Ruang Terbuka Hijau	terminal rawasari Kecamatan Pasar Jambi , Kota Jambi, ,			RUBI SALAM
54	Bantuan Gerobak Motor Sampah	RT. 18 Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, ,			RUBI SALAM
55	Bantuan Gerobak Motor Sampah	Kelurahan Bakung Jaya dan Talang B akung, Kota Jambi, ,		2 unit	HIZBULLAH, S.Si
56	Pembentukan Bank Sampah	kelurahan talang bakung dan bakung jaya, Kota Jambi, ,			HIZBULLAH, S.Si

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan nasional Tahun 2025-2029 adalah “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Dalam upaya mencapai visi tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 8 (delapan) misi pembangunan nasional atau Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideology Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan berpedoman pada rumusan visi dan misi pembangunan nasional, maka prioritas dan sasaran daerah dan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Perioritas dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No.	Perioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Air
					Indeks Kualitas Udara
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan
					Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah Terwujudnya Akseibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan. Adapun Sasaran yang akan dicapai adalah Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim.

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan DLH Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,18

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran DLH Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Air	46,75
		Indeks Kualitas Udara	90,0
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60,90
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	58,10

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Utama DLH Tahun 2026
(1)	(2)	(3)
1	Indeks Kualitas Air	46,75
2	Indeks Kualitas Udara	90,0
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60,90
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	58,10

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Program merupakan implementasi dari strategi organisasi, yaitu proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1**Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
1	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Program	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Kegiatan	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Kegiatan	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

		Kegiatan	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			4. Fasilitas Kunjungan Tamu
			5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Sub Kegiatan	1. Pengadaan Mebel
			2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Kegiatan	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Sub Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
			3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Program	2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Kegiatan	9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

		Sub Kegiatan	1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
		Kegiatan	10. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan	1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 1. Pemantauan dan Evaluasi KLHS
		Program	3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Kegiatan	11. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK 5. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 6. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 7. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 8. Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		Kegiatan	12. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan	1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan

		Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Kegiatan	13.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
	2.	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemaran
Program	4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Kegiatan	14.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
	2.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	3.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
Program	5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Kegiatan	15.	Penyimpanan Sementara Limbah B3
Sub Kegiatan	1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	2.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.
	3.	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
Kegiatan	16.	Pengumpul Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi

			dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
		Program	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Kegiatan	17. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan	1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 2. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 3. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
		Program	7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Kegiatan	18. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
		Program	8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

		Kegiatan	19. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan	1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Program	9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Kegiatan	20. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan	1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
			3. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Program	10. Program Pengelolaan Persampahan
		Kegiatan	21. Pengelolaan Sampah
		Sub Kegiatan	1. Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah
			2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
			3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
			4. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA TPST kabupaten kota atau TPA TPST Regional
			5. Penanganan sampah melalui pengangkutan

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokas i	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
						Dinas Lingkungan Hidup								96.575.576.991
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				54.482.374.000				96.575.576.991
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		Kota Jambi		54.482.374.000				98.206.758.191
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah		BB nilai	14.821.133.386			BB nilai	20.175.860.532
	2	11	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP		70 Nilai	30.538.100			70 Nilai	114.947.673

	2	11	01	2.0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	22.973.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	11.249.896,00
	2	11	01	2.0 1	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	76.324.539,00
	2	11	01	2.0 1	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	12.656.954,00
	2	11	01	2.0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	6.810.466,00
	2	11	01	2.0 1	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16 Laporan	7.564.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Laporan	7.905.818,00
	2	11	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan		100 %	12.662.417.102			100 %	14.223.344.998
	2	11	01	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		90 Orang/ bulan	12.247.712.702	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)		155 Orang/ bulan	13.468.325.279,00

2	11	01	2.0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	410.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48 Dokumen	734.972.344,00
2	11	01	2.0 2	00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	4.544.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	11.002.318,00
2	11	01	2.0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	9.045.057,00
2	11	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah	100 %	12.600.000		100 %	91.886.916
2	11	01	2.0 3	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	91.886.916,00
2	11	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah	77 Nilai	177.600.000		78 Nilai	498.388.425
2	11	01	2.0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	133.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	198.092.730,00
2	11	01	2.0 5	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	44.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Orang	300.295.695,00

	2	11	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100 %	145.756.764			100 %	725.957.907
	2	11	01	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		11 Paket	10.868.790	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Paket	20.869.090,00
	2	11	01	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	13.012.974	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	49.904.067,00
	2	11	01	2.0 6	00 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	31.944.000,00
	2	11	01	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	116.875.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	623.240.750,00
	2	11	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100 %	-			100 %	2.353.813.213
	2	11	01	2.0 7	00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		6 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	-
	2	11	01	2.0 7	00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	1.788.154.500,00
	2	11	01	2.0 7	00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		74 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		74 Unit	150.896.002,00

	2	11	01	2.0 7	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		23 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Unit	414.762.711,00
	2	11	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100 %	1.217.151.620			100 %	1.029.029.480
	2	11	01	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	1.023.079.090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	582.179.400,00
	2	11	01	2.0 8	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Laporan	111.387.730	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	92.926.532,00
	2	11	01	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 Laporan	82.684.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	353.923.548,00
	2	11	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100 %	575.069.800				1.138.491.920
	2	11	01	2.0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20 Unit	500.059.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	400.829.452,00

	2	11	01	2.0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		53 Unit	75.010.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53 Unit	69.819.468,00
	2	11	01	2.0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi		1 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	667.843.000,00
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD		100 %				100 %	369.993.365
	2	11	02	2.0 1		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		100 %	-			100 %	350.000.000
	2	11	02	2.0 1	00 06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	350.000.000,00
	2	11	02	2.0 2		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup dengan RPJPD/RPJMD		100 %				100 %	19.993.365

	2	11	02	2.0 2	00 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			-				
	2	11	02	2.0 2	00 04	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	19.993.365,00
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air Indkes kualitas udara		46,75 90	571.259.833			46,78 90	2.036.431.647
	2	11	03	2.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi		100 %	571.259.833			100 %	1.929.515.706
	2	11	03	2.0 1	00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		2 Dokumen	44.867.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	94.176.115
	2	11	03	2.0 1	00 05	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK		1 Dokumen	55.590.751	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	112.801.805

	2	11	03	2.0 1	00 07	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		15 Lokasi	54.841.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Lokasi	129.793.301
	2	11	03	2.0 1	00 08	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		2 Laporan	17.723.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	156.718.727
	2	11	03	2.0 1	00 11	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		1 Dokumen	49.406.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	89.905.024
	2	11	03	2.0 1	00 15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		12 Dokumen	348.830.342	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	1.346.120.734
	2	11	03	2.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi		100 %				100 %	15.357.309

	2	11	03	2.0 2	00 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		2 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	15.357.309
	2	11	03	2.0 3		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup		0,28 %				0,28 %	91.558.632
	2	11	03	2.0 3	00 11	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		150 M2		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 M2	91.558.632
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan		50,02 Nilai	5.666.512.618			50,02 Nilai	10.837.179.102
	2	11	04	2.0 1		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi		6%	5.666.512.618			6%	10.837.179.102
	2	11	04	2.0 1	00 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		971,18 Ha	4.924.026.870	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		971,18 Ha	8.223.114.350

	2	11	04	2.0 1	00 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		53 Unit	327.545.748	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53 Unit	682.910.272
	2	11	04	2.0 1	00 09	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Unit	434.940.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	1.931.154.480
5	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)		100 %	41.868.879			100 %	47.420.995
	2	11	05	2.0 1		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3		100 %	4.386.540			100 %	19.537.238
	2	11	05	2.0 1	00 05	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)		17 Dokumen	4.386.540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Dokumen	19.537.238
	2	11	05	2.0 2		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas		100 %				100 %	27.883.757

							pelayanan kesehatan							
	2	11	05	2.0 2	00 04	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina		100 Usaha		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Usaha	27.883.757
6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		100 %	30.649.400			100 %	658.844.999
	2	11	06	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup		31 %	30.649.400			31 %	658.844.999
	2	11	06	2.0 1	00 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		150 Dokumen	6.336.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Dokumen	155.997.937

	2	11	06	2.0 1	00 07	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya		4 Orang	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Orang	224.848.386
	2	11	06	2.0 1	00 09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		100 Badan Usaha	4.312.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Badan Usaha	277.998.676
7	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100 %	17.850.000			100 %	608.657.500
	2	11	08	2.0 1		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/Instansi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya		100 %	17.850.000			100 %	608.657.500

	2	11	08	2.0 1	00 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		2 Dokumen	7.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	278.657.500
	2	11	08	2.0 1	00 05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		3 Lembaga	9.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Lembaga	330.000.000
						PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup						100%	325.424.000
						Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						100%	325.424.000

						Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH						33 Lembaga	325.424.000
8	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100 %	14.496.000			100 %	165.000.000
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100 %	14.496.000			100 %	165.000.000
	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola		35 Pengaduan	6.996.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Pengaduan	55.000.000
	2	11	10	2.01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan		15 Sanksi	7.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Sanksi	110.000.000

							kabupaten/kota							
9	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan		98%	31.566.894.423			100 %	62.166.355.451
	2	11	11	2.0 1		Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA		23.5%	31.566.894.423			235%	62.166.355.451
	2	11	11	2.0 1	00 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		2 Kelompok	28.353.420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Kelompok	142.147.748
	2	11	11	2.0 1	00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	27.500.000
	2	11	11	2.0 1	00 12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		1116613,8 4 Ton	25.632.451.503	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110.000 Ton	49.500.000.000

						Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						23.202,14 Ton	892.500.000
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupat en/kota atau TPA/TPST Regional		130.000 Ton	5.100.653.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		135.000 Ton	8.800.000.000
	2	11	11	2.01	0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang		11,41694 Ton	805.436.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.987,78 Ton	1.173.026.503
						UPTD Pengelolaan Sampah				741.446.000				815.590.600
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				741.446.000				815.590.600
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				741.446.000				815.590.600

	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah		BB Nilai	1.768.755.800			BB Nilai	815.590.600
	2	11	01	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tertib pengelolaan administrasi umum		100 %	1.768.755.800			100 %	815.590.600
	2	11	01	2.1 0	00 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	741.446.000	PENDAPATAN DARI BLUD		1 Unit Kerja	815.590.600
						Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Laboratorium	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		1 Unit Kerja	550.000.000				
						Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Laboratorium	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		1 Unit Kerja	477.745.800				
	J U M L A H									54.482.374.000				96.575.576.991

BAB V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini yang merupakan rangkaian rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk tahun 2026. Renja Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah. Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 mempedomani Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan.

Dengan demikian diharapkan pula agar program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tahun 2026 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik demi tercapainya tujuan strategis.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.